LAMPIRAN II.a : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2019 TANGGAL : 3 JULI 2019

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

	Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Transpor Pegawai	Biaya Penginapan	Jumlah Hari yang dibayarkan	Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah
a.	Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	V	√	Sesuai penugasan	-
b.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	~	V	√	Sesuai penugasan	-
c.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan.	√	V	V	Sesuai penugasan	-
d.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	~	\checkmark	√	Sesuai penugasan	-
e.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3.	V	V	V	Sesuai penugasan	-
f.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.	√3)	√2)	√1)	Sesuai penugasan	-
ø.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.	V	٧	V	Sesuai penugasan	√
h.	Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.	V	V	√	Sesuai penugasan	V

Keterangan:

- 1. $\sqrt{1}$: Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan.
- 2. $\sqrt{2}$: Biaya Transport diberikan selama melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.
- 3. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada huruf h: uang harian, biaya transport Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan PTT/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

BUJAERAMY HASSAN, SH

ttd

Pangkat: Pembina Tk. I

LAMPIRAN II.c : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 18 TAHUN 2019
TANGGAL : 3 JULI 2019
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARA

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020

CONTOH RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Ιa	RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPPD Nomor :						
	Tanggal :						
	No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN			
	1.						
	2.						
	3.						
	4.						
	5.						
	6.						
		Terbilang					
				,tanggal, bulan, tahun			
	Te	elah dibayar sejumlah	Tela	ah menerima jumlah uang sejumlah			
	Rp	j	Rp.				
	Bendahara Pengeluaran/ Yang Menerima						
	Bendahara Pengeluaran Pembantu,						
()				()			
	NIP. NIP.						
	PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG						
	Dite	tapkan sejumlah	:Rp				
	Yang telah dibayar semula		:Rp	:Rp			
Sisa kurang/lebih		:Rp	:Rp				
	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran						
)			
	1411						

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I



LAMPIRAN II.f : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 18 TAHLIN 2019

NOMOR : 18 TAHUN 2019 TANGGAL : 3 JULI 2019

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPPD DAN KELUARGA

	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
PELAKSANA SPPD		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
Pejabat Negara, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD Provinsi;	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai kenyataan
Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Fungsional Golongan IV/c keatas, Tenaga Ahli danStaf Khusus;	В	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I serta pejabat lainnya yang setara;	С	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Pejabat Eselon IV dan Fungsional Golongan III/c dan Gol.III/b;	D	Ekonomi	Kelas IIB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Non Eselon Gol.IV, Gol.III dan yang disetarakan serta Pejabat Fungsional trampil Golongan III/a dan III/b;	E	Ekonomi	Kelas IIB	Eksekutif	Sesuai kenyataan
Non Eselon Gol.II dan Gol.I PTT, Non PNSD dan yang disetarakan	F	Ekonomi	Kelas IIIA	Ekonomi	Sesuai kenyataan

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat: Pembina Tk. I



LAMPIRAN II.o : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2019 TANGGAL : 3 JULI 2019

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

	URAIAN	SATUAN	BESARAN			
1.	1. Darat					
	a. Pengepakan dan penggudangan	m³	Rp.75.000,00			
	b. Angkutan	km³/ m³	Sesuai tarif berlaku			
2.	2. Laut/Sungai					
	a. Pengepakan dan penggudangan	m³	Rp.60.000,00			
	b. Angkutan	km³/ m³	Rp.400,00			
	c. Angkutan Laut/Sungai	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	тр. 100,00			
		m^{3}	Sesuai tarif berlaku			

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat: Pembina Tk. I

 $LAMPIRAN \ II.p \\ \hspace{2.5cm} : \hspace{2.5cm} PERATURAN \ GUBERNUR \ SULAWESI \ BARAT$

NOMOR : 18 TAHUN 2019 TANGGAL : 3 JULI 2019

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

	GOLONGAN PELAKSANA SPPD			
URAIAN/TUJUAN	GOLONGAN A	GOLONGAN B	GOLONGAN C & D	GOLONGAN E & F
Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan				
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25m³	20m³	15m³	10m³
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15m³	12m³	9m³	6m³
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5m³	4m³	$3m^3$	2m³

GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat: Pembina Tk. I



LAMPIRAN II.q : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2019 TANGGAL : 3 JULI 2019

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020

CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini:				
Nama	······(1)			
NIP	:(2)			
Jabatan	:(3)			
Unit Kerja	:(4)			
SKPD	:(5)			
Menyatakan dengan sesung	guhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama :			
Nama	:(6)			
NIP	:(7)			
Jabatan	:(8)			
Unit Kerja	:(9)			
SKPD	:(10)			
Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan yang diakibatkan perintah pejabat yang berwenang dan/atau diluar kendali pelaksana SPPD yaitu(11)				
Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/PNS/PTT lain.				
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.				
	Yang MembuatPernyataan			
	(13)			

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat: Pembina Tk. I



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
- (9) Diisi nama Unit KerjaPelaksana SPPD
- (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPPD
- (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
- (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
- (13) Diisi tandatangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat: Pembina Tk. I



LAMPIRAN II.r : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 18 TAHUN 2019 3 JULI 2019 TANGGAL

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020 TENTANG

CONTOH SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN					
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN					
Yang bertandatangan dibawahini:					
Nama	:(1)				
NIP	······(2)				
Jabatan	:(3)				
Unit Kerja	:(4)				
SKPD	:(5)				
	guhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas dan SPPD Nomor tanggal atas nama:				
Nama	:(6)				
NIP	:(7)				
Jabatan	:(8)				
Unit Kerja	:(9)				
SKPD	:(10)				
Dibatalkan sesuai dengan Nomor tanggal	surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan				
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa(11) dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesarRp					
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.					
(14)					
Yang Membuat Pernyataan					
(15)					

Salinan Sesuai Dengan Aslinya GUBERNUR SULAWESI BARAT, KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
- (8) DiisijabatanPelaksana SPPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (11) Diisi transport yang digunakan
- (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund sebagian/seluruhnya
- (13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan
- (15) Diisi tandatangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat: Pembina Tk. I



LAMPIRAN II.s : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2019 TANGGAL : 3 JULI 2019

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020

CONTOH DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTARPENGELUARANRIIL						
Yang bertandatangandibawahini:						
Nama :						
NIP :						
Jaba	tan :					
	Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:					
	transport pejabat/pegawai dan/atau biaya pengir oleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:	napan dibawah ini yang tidak dapat				
No	Uraian	Jumlah				
	Jumlah					
Perja	2. Jumlah uang tersebut pada angka1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dana pabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.					
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.						
Mengetahui/Menyetujui:,tanggal, bulan, tahun						
Pengguna	Pengguna Anggaran/					
Kuasa Pengguna Anggaran, Pelaksana S		Pelaksana SPPD,				
NIP						

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

